

► PENYANDANG DISABILITAS

# Hak Belum Terpenuhi

**BANTUL**—Hak penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum terpenuhi dengan baik. Banyak bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, hukum, rehabilitasi, dan pekerjaan masih belum mengakomodasi penyandang disabilitas.

Joko Nugroho  
joko@harianjogja.com

Koordinator Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD), Arni Surwanti mengatakan permasalahan penyandang disabilitas seperti pada bidang aksesibilitas, jalan, bangunan dan transportasi. Di DIY sendiri masih sangat minim trotoar yang bisa digunakan penyandang disabilitas.

"Kemudian pada bidang medis, belum semua penyandang disabilitas mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Lebih parah lagi, ada sejumlah asuransi kesehatan memasukkan salah satu persyaratan menjadi anggota adalah tidak menyandang disabilitas," kata saat seminar Hasil Kajian Permasalahan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Tingkat Kabupaten di Provinsi DIY di ruang seminar lantai 4 Gedung Pascasarjana UMY, Senin (31/8).

Seminar yang diselenggarakan oleh FPHPD yang merupakan kerjasama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Ciqal dan Ila'i dihadiri puluhan penyandang disabilitas se-DIY.

► Belum semua penyandang disabilitas mendapat jaminan kesehatan

► 40% penyandang disabilitas di DIY belum bisa mengakses pendidikan

Arni menambahkan situasi yang dihadapi penyandang disabilitas memang masih memprihatinkan. Di DIY saja ada lebih dari 40% penyandang disabilitas yang belum dapat menikmati pendidikan. Baru sekitar 20% dari mereka yang bekerja. Situasi ini ternyata tidak lepas dari pandangan kuat di masa lalu bahwa penyandang disabilitas adalah persoalan medis semata.

"Akibatnya program pemerintah cenderung hanya berupa kegiatan pemberian bantuan-bantuan kebutuhan hidup. Sementara kegiatan untuk memberdayakan mereka sangat minim dan terbatas pilihannya," jelas Arni.

Arni berharap ke depan para penyandang disabilitas bisa bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi. Bahkan merendahkan martabat mereka sebagai manusia.

"Namun untuk mewujudkan hal itu perlu diatur dalam peraturan daerah (Perda) yang segala kebijakannya harus berpihak pada mereka. Dan bisa memberikan kesejahteraan pada para penyandang disabilitas," lanjut Arni.

Salah satu narasumber yang sekaligus Ketua Program Pascasarjana Magister Manajemen UMY Prof. Dr. Heru Kurnianto mengatakan penolakan penyandang disabilitas untuk bekerja juga masih dibatasi. Ada sejumlah perusahaan yang

Program pemerintah cenderung hanya berupa kegiatan pemberian bantuan-bantuan kebutuhan hidup. Sementara kegiatan untuk memberdayakan mereka sangat minim dan terbatas pilihannya,

mengaku tidak berani mempekerjakan penyandang disabilitas.

"Saat kami melakukan penelitian kecil menemukan perusahaan yang menolak calon tenaga kerja jika mereka penyandang disabilitas. Alasannya cukup beragam, namun beberapa diantaranya bilang jika belum pernah memiliki pekerja disabilitas dan kami belum membutuhkan karyawan baru," kata Heru.

Heru mengaku, pernyataan ini terlontarkan dengan santainya disaat perusahaan itu sedang membuka lowongan pekerjaan. Ini benar-benar menyedihkan dan seharusnya bisa dihindari.

"Harapan ke depan jangan ada lagi penolakan kesetaraan pada penyandang disabilitas di DIY. Selain itu harus ada penguatan dari pemerintah dengan membuat perda kesetaraan penyandang disabilitas dengan warga normal yang lain," kata Heru. (Joko Nugroho)